

RINGKASAN

MATAHARI SUHAIMI
NIM 210510330

**Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2024/PN Lsm)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M dan
Sumiadi, S.H., M.Hum)**

Penuntutan terhadap suatu tindak pidana narkotika merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Dalam surat tuntutan tersebut, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya tuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum secara garis besar mengacu kepada Pasal-Pasal yang didakwakan dan Pembuktian di Persidangan. Aturan hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan tidak memperhatikan secara detail semua faktor salah satunya peran terdakwa, sehingga salah dalam menentukan Pasal pada tuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor.149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, serta menilai kesesuaian tuntutan dengan fakta hukum pembuktian yang ada dalam perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan kepustakaan dan wawancara lapangan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa hanya menuntut terdakwa sebagai pengguna narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, padahal fakta persidangan menunjukkan terdakwa juga menjual sabu. Tuntutan ini dinilai tidak sesuai dengan bukti yang ada. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat berdasarkan Pasal 114 ayat (1) karena terdakwa terbukti sebagai pengedar. Hal ini menunjukkan kurangnya ketelitian jaksa dalam menyusun tuntutan sesuai fakta hukum.

Diharapkan Jaksa Penuntut Umum sebaiknya lebih teliti dan objektif dalam menyusun tuntutan, dengan mempertimbangkan peran terdakwa, barang bukti, dan fakta persidangan secara menyeluruh. Selain itu, perlu adanya evaluasi internal di lingkungan kejaksaan agar setiap tuntutan benar-benar mencerminkan keadilan dan mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Pembuktian, Narkotika.

SUMMARY

MATAHARI SUHAIMI
210510330

***Juridical Analysis of the Prosecutor's Claim
Public Prosecutor in Narcotics Crime Case
(Case Study of Decision Number
149/Pid.Sus/2024/PN Lsm)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M dan
Sumiadi, S.H., M.Hum)***

The prosecution of a narcotics crime is a function carried out by the Prosecutor's Office, in this case the public prosecutor. In the letter of demand, considerations are included in filing his criminal charges which consist of incriminating matters and those that mitigate the defendant. In determining the severity of the charges, the Public Prosecutor generally refers to the Articles charged and the Evidence at the Trial. The legal rule is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Decision No. 149/Pid.Sus/2024/PN NGOs, the Public Prosecutor determined that the prosecution did not pay attention to all factors in detail, one of which was the role of the defendant, so that it was wrong in determining the article in the prosecution. This study aims to find out what is the basis for the public prosecutor's consideration in prosecuting narcotics crimes in Decision No.149/Pid.Sus/2024/PN NGOs, and assessing the suitability of the charges with the evidentiary legal facts in the case. The research method used is an empirical juridical research method with literature and field interviews at the Lhokseumawe District Attorney's Office to collect data. The results of the study showed that the prosecutor only prosecuted the defendant as a narcotics user in accordance with Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, even though the facts of the trial showed that the defendant also sold methamphetamine. This claim is considered inconsistent with the existing evidence. So the Judge handed down a heavier verdict based on Article 114 paragraph (1) because the defendant was proven to be a dealer. This shows the lack of thoroughness of the prosecutor in drafting charges according to legal facts. It is hoped that the Public Prosecutor should be more thorough and objective in drafting charges, taking into account the role of the defendant, evidence, and the facts of the trial as a whole. In addition, there needs to be an internal evaluation within the prosecutor's office so that every demand truly reflects justice and supports the eradication of narcotics crimes.

Keywords: *Public Prosecutor, Prosecution, Evidence, Narcotics.*